STUDI FENOMENOLOGI KECURANGAN MAHASISWA DALAM PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN MAHASISWA: SEBUAH REALITA DAN PENGAKUAN

Ruri Ihsania Cahyaningtyas
M. Achsin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

This research background is the indication of fraudulent practices in educational environment which are conducted by students in Accountability Reporting (LPJ) of student activity funds. The purpose of this study is determining and provide an overview of that fraud in Economics and Business Faculty, Brawijaya University (FEB UB) based on each informant's experiences. Phenomenology is used as a method to find informant's understanding and awareness about fraud that conducted by students in LPJ, by using data analysis model Transcedental Husserl. This study's findings indicate that kind of fraud done by students are the forgery of signatures and transaction evidence, mark up / mark down, and misappropriation of activity funds. The cause of fraud explained using the perspective of Fraud Pentagon theory, conducting of arrogance; competency; opportunity; pressure; and rationalization, in which religion is a bulwark for students to prevent fraud in LPJ. It takes good cooperation of various parties, not only the students but also the Deanery and the goverment, in oder to strive for changes in Accountability Reporting of students activities funds system to ensure that students will not hesitate to revealing LPJ according to actual conditions that occured.
Keywords: *Student's Fraud, The Accountability Reporting of Student Activity Fund, Phenomenology.*

Pendahuluan

Harvey S. Firestone, seorang pebisnis asal Amerika yang merupakan founder dari Firestone Tire and Rubber Company yang merupakan cikal bakal dari Bridgestone, salah satu pabrikan ban terbesar di dunia saat ini, pernah mengatakan

"Saya percaya kejujuran mendasar adalah kunci dari bisnis."

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa bisnis ibarat sesuatu yang terkunci dan untuk membukanya diperlukan kejujuran. Dengan kata lain kejujuran merupakan poin penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Sayangnya, lingkungan bisnis saat ini sangat dekat dengan ketidakjujuran. Banyak perusahaan dunia mengalami kegagalan dan terpaksa gulung tikar karena pondasi kejujuran yang lemah dalam organisasinya, sebut saja Enron, Tyco International, Worldcom, Walt Disney Company, Global Crossing, dan deretan perusahaan dunia lainnya mengalami kebangkrutan disebabkan oleh ketidakjujuran dalam bentuk manipulasi pembukuan, *insider trading*, penipuan sekuritas, dan penggelapan pajak (Irianto, 2003: 104-105). Ketidakjujuran dalam dunia bisnis ini kemudian sering disebut dengan istilah *fraud* atau kecurangan.

Dalam dunia bisnis, kebanyakan praktik kecurangan yang terjadi disebabkan karena penyalahgunaan wewenang serta rendahnya kesadaran moral seseorang dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki. Manipulasi pembukuan merupakan salah satu pemicu terjadinya sebagian besar skandal korporasi yang ada pada beberapa perusahaan dunia yang mengalami kebangkrutan (Irianto, 2003: 104). Manipulasi pembukuan terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang atas pembukuan perusahaan

menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahi kewajiban untuk berperilaku etis dengan tujuan tertentu atas dasar kepentingan individu maupun kelompok.

Di Indonesia sendiri praktik kecurangan terutama korupsi menjadi bahasan panas yang ramai diperbincangkan dalam diskusi terkait masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Hal ini tidak lain dikarenakan korupsi menjadi budaya yang sulit untuk diberantas sampai ke akarnya. Sejarah mencatat bahwa praktik korupsi sudah ada sejak awal abad ke-17 ketika Indonesia berada dalam masa penjajahan, banyak pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* kala itu yang memperkaya diri sendiri lantaran gaji yang rendah, praktik suap dan penyelewengan aset merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC pada masa itu, bahkan kebangkrutan dari VOC disebabkan oleh praktik korupsi yang ada dalam organisasi itu sendiri (Marwahid, 2013).

Salah satu cara untuk melawan pewarisan budaya kecurangan pada generasi muda adalah melalui pendidikan. Pendidikan secara formal maupun informal merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Fortune, majalah bisnis terkemuka di Amerika Serikat, dalam Irianto (2003: 105) menunjukkan bagaimana potret perilaku responden yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, alumnus perguruan tinggi, dan juga para manajer yang masih kental dengan perilaku kecurangan. Dari survei yang dilakukan di lingkungan pendidikan tinggi (setingkat SMU) menunjukkan bahwa 70-80% responden melakukan *cheating* (ngrepek, menjiplak, dan sejenisnya), sedangkan di lingkungan perguruan tinggi angka tersebut lebih rendah yaitu antara 40-50%. Tidak ketinggalan bahwa 12-24% lulusannya menulis informasi yang tidak benar dalam *resume*/*curriculum vitae* mereka.

Fakta bahwa praktik kecurangan akrab di kalangan mahasiswa perguruan tinggi juga ditunjukkan dari hasil penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2014: 73) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Hasil penyebaran kuesioner tersebut menunjukkan bahwa

> Sebanyak 174 responden (100%) mengaku pernah melakukan kecurangan akademik pada saat ujian. Dalam hal ini peneliti memang sengaja hanya mengambil data dari responden yang pernah melakukan kecurangan akademik agar mendapatkan data yang akurat. Dari 174 responden sebanyak 160 orang (92%) mengaku pernah menjumpai kecurangan akademik di lingkungan FEB UB dan 14 orang mengaku tidak pernah menjumpai kecurangan akademik di lingkungan FEB UB.

Hal ini memberikan gambaran bahwa masih banyak ditemukan praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Parahnya kecurangan ini dilakukan oleh mahasiswa yang notabene merupakan "produk" SDM yang dihasilkan dari institusi pendidikan perguruan tinggi. Mahasiswa yang terbiasa melakukan kecurangan di bangku perkuliahan cenderung juga akan melakukan ketidakjujuran dalam organisasi tempat ia bekerja nantinya (Adib, 2001 dalam Irianto, 2003: 106). Dikhawatirkan kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa di masa pendidikan akan berdampak buruk bagi kualitas individu yang bersangkutan terlebih ketika terjun dalam masyarakat dan dunia kerja sehingga perlu adanya studi penelitian untuk memahami perilaku mahasiswa berkaitan dengan kecurangan dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

Banyak penelitian telah dilakukan berkaitan dengan masalah kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kebanyakan penelitian tersebut membahas tentang kecurangan mahasiswa dalam aktivitas akademik, padahal mayoritas mahasiswa juga aktif di organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Sangat jarang penelitian yang fokus

membahas kecurangan mahasiswa dalam aktivitas organisasi dikarenakan pembahasan yang bersifat sensitif dan *private* di kalangan mahasiswa sendiri, terlebih lagi "kecurangan mahasiswa" dalam organisasi juga masih menjadi sebuah rahasia umum yang tidak semua orang bahkan mahasiswa sendiri memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk terjun dalam bahasan tersebut.

Dalam aktivitas organisasi, mahasiswa melaksanakan banyak kegiatan sebagai bentuk program kerja dari sebuah organisasi disamping sebagai sarana mengembangkan *soft skill* mahasiswa dalam berorganisasi. Kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut tidak akan terselenggara dengan baik tanpa dukungan finansial. Dalam hal ini, dekanat/fakultas merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan mahasiswa dengan menyediakan dana pengembangan pendidikan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menjalankan program kerja dari masing-masing organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) dalam bentuk kegiatan-kegiatan mahasiswa.

Dalam pengelolaan dana kegiatan mahasiswa tersebut tentu akan berujung pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan mahasiswa kepada pihak dekanat. Laporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa atau singkatnya disebut LPJ yang kemudian menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Adanya indikasi mahasiswa melakukan kecurangan dalam LPJ dengan beragam cara dan frekuensi yang relatif tinggi membuat peneliti mantap memilih topik ini untuk kemudian diteliti lebih lanjut.

Ketertarikan peneliti untuk menelisik lebih jauh tentang kecurangan mahasiswa yang terjadi di organisasi intra kampus berawal dari pengalaman peneliti yang kerap menjumpai praktik kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam organisasi di FEB UB. Peneliti yang juga aktif di salah satu organisasi mahasiswa di FEB UB sempat beberapa kali melihat teman-teman sesama mahasiswa melakukan kecurangan dalam LPJ dana kegiatan mahasiswa. Bentuk kecurangan yang dilakukan pun beragam, kebanyakan berupa pemalsuan, mulai dari tanda tangan hingga bukti transaksi, bahkan tak segan mahasiswa juga melakukan *mark up* dalam LPJ dana kegiatan mahasiswa. Intinya, apa yang dilaporkan mahasiswa dalam LPJ tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan kondisi keuangan yang sesungguhnya terjadi.

Mengingat peran mahasiswa yang merupakan cikal bakal pemimpin masa depan dengan kondisi saat ini dimana kecurangan sudah akrab di kehidupan organisasi mahasiswa tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Muncul kekhawatiran tentang kondisi di masa depan apabila sedari awal mahasiswa sudah terbiasa dengan kecurangan. Kekhawatiran akan adanya praktik kecurangan di dunia kerja setelah mahasiswa lulus dan ketika menjadi sosok pemimpin tentu tidak diharapkan terjadi. Sehingga peneliti merasa penting untuk memahami bagaimana mahasiswa melakukan kecurangan dan alasan dibalik mahasiswa melakukan kecurangan dalam LPJ dana kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti memilih topik ini untuk melihat kecurangan yang dilakukan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan kerangka berpikir dari satu kesatuan realitas sosial yang kompleks dan dinamis berdasarkan pengungkapan fakta (Indriantoro dan Supomo, 2013: 12). Dalam pengungkapan fakta tersebut digunakanlah metode fenomenologi yang

menekankan pada pengalaman dari orang yang mengalami langsung dan terlibat dalam kesatuan realitas sosial yang terjadi (Kuswarno, 2009: 35-36).

Beberapa alasan yang membuat peneliti memilih penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dalam membantu menjelaskan masalah dan hasil penelitian. Pertama, peneliti ingin mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru dan sedikit diketahui, dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa, sangat jarang penelitian yang membahas topik tersebut sehingga penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini. Alasan kedua karena sifat dan masalah yang diteliti berkenaan dengan pengalaman mahasiswa dalam organisasi ketika menghadapi fenomena kecurangan LPJ. Alasan terakhir, penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi mampu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perilaku dan peranan mahasiswa dalam organisasi.

Penelitian ini menggunakan fenomenologi Transendental Husserl yang menekankan penemuan makna dan hakikat dari suatu pengalaman berdasarkan subjektifitas pengungkapan inti dari pengalaman melalui penggabungan antara kenyataan dan kondisi ideal (Kuswarno, 2009: 40). Fenomenologi Transendental Husserl dirasa paling sesuai dengan penelitian ini, karena peneliti bertujuan memahami inti dari pengalaman informan berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari sumber asli dan diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara apapun (Indriantoro dan Supomo, 2013: 146,147). Adapun data primer yang berhasil didapat oleh peneliti berupa transkrip wawancara, AD/ART KM FEB UB MUMFEB 2013 dan *flowchart* pengajuan proposal kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer dari informan berkaitan dengan pengalaman informan selama pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa. Teknik pengumpulan data ini dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan tingkat keabsahan data yang diperoleh. Tidak semua orang merasa nyaman untuk membuka pengalamannya berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa, terlebih apabila didalamnya ada unsur kecurangan yang dilakukan, karena masalah penelitian yang bersifat sensitif ini, peneliti kemudian memutuskan untuk melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang sebelumnya sudah peneliti kenal untuk menjamin validitas data yang terkumpul.

Informan dalam penelitian ini diambil dari dua golongan, yakni mahasiswa dan pihak dekanat. Peneliti memilih mengambil informan dari dua golongan tersebut karena dianggap dapat mewakili pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses LPJ dan memiliki pemahaman tentang kecurangan mahasiswa dalam LPJ di FEB UB. Di awal penelitian, peneliti tidak menetapkan jumlah informan. Peneliti terus melakukan wawancara kepada informan yang berbeda hingga data yang diperoleh jenuh dengan begitu informan yang dipilih semakin lama semakin terarah pada fokus penelitian, proses ini dinamakan Bodan dan Biklen (1982) dalam Sugiyono (2009: 301) sebagai *continous adjustment of focusing in the sample*. Peneliti kemudian berhenti melakukan wawancara pada informan kedelapan karena merasa data yang diperoleh sudah mencukupi untuk kemudian dianalisis. Kedelapan informan tersebut terdiri dari enam orang mahasiswa dan dua orang staf ahli bidang kemahasiswaan.

Keenam mahasiswa dan dua staf ahli bidang kemahasiswaan FEB UB tersebut memiliki pengalaman langsung dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana

kegiatan mahasiswa. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki tersebut, kedelapan informan ini mampu menjelaskan tentang kecurangan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa kepada peneliti.

Adapun kriteria informan mahasiswa sebagai berikut:

1. Aktif dalam organisasi di FEB UB.
2. Pernah menjabat sebagai inti kegiatan (ketua pelaksana/ sekretaris pelaksana/ wakil ketua pelaksana/ bendahara pelaksana) dalam pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan mahasiswa.

Sedangkan kriteria informan dari pihak dekanat adalah memiliki pengalaman langsung berhubungan dengan pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa. Informan dengan kriteria tersebut dianggap mampu mendeskripsikan dengan jelas dan mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Scheglof dan Sacks dalam Kuswarno (2009: 49) tugas peneliti dalam penelitian fenomenologi adalah merekam kondisi sosial, sehingga memungkinkan untuk menggambarkan cara-cara yang dilakukan oleh informan. Dalam prosesnya peneliti melakukan analisis data dengan menginterpretasikan makna perbuatan dan pemikiran untuk memperoleh gambaran bagaimana manusia berpikir berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.

Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian fenomenologi Transendental Husserl yang meliputi:

1. Epoche
   Pada tahap awal peneliti menggunakan epoche selama proses wawancara dengan berusaha memisahkan antara pemahaman yang dimiliki peneliti dengan pemahaman informan, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hakikat objek sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan.

2. Reduksi Fenomenologi
   Setelah langkah awal dilakukan dengan memurnikan objek dari pengalaman dan prasangka awal (epoche), maka selanjutnya peneliti melakukan reduksi fenomenologi yang meliputi:
   (1) *Bracketing*
   Peneliti melakukan *bracketing* selama wawancara berlangsung dan ketika proses pembuatan transkrip wawancara dengan memberi tanda untuk setiap kata kunci dari penjelasan informan.
   (2) *Horizonalizing*
   Setelah peneliti melakukan *bracketing* peneliti kemudian membandingkan persepsi antara informan satu dengan yang lain.
   (3) *Horizon*
   Setelah membanding persepsi dari masing-masing informan, peneliti kemudian melakukan *horizon* dari hasil membandingkan persepsi antara informan satu dengan yang lain.
   (4) Mengelompokkan horizon-horizon ke dalam tema-tema tertentu, dan mengorganisasikannya ke dalam deskripsi tekstural dari fenomena yang relevan. Setelah proses menemukan esensi dari fenomena, peneliti mengelompokkan transkrip wawancara berdasarkan tema-tema tertentu/protokol sesuai dengan penjelasan dari informan.

3. Variasi Imajinasi
   Setelah reduksi fenomenologi dilakukan, selanjutnya peneliti menggunakan variasi imajinasi dimana didalamnya intuisi berperan dalam menemukan deskripsi tekstural dan struktural atas fenomena yang sedang diamati.

4. Sintesis Makna dan Esensi
   Setelah mendapatkan deskrisi tekstural dan struktural selanjutnya adalah menemukan esensi dan makna dari objek fenomena yang sedang diamati dan berlanjut dengan penarikan kesimpulan yang dituangkan dalam laporan penelitian, dimana dalam penulisan laporan penelitian tersebut peneliti juga melakukan validasi data.

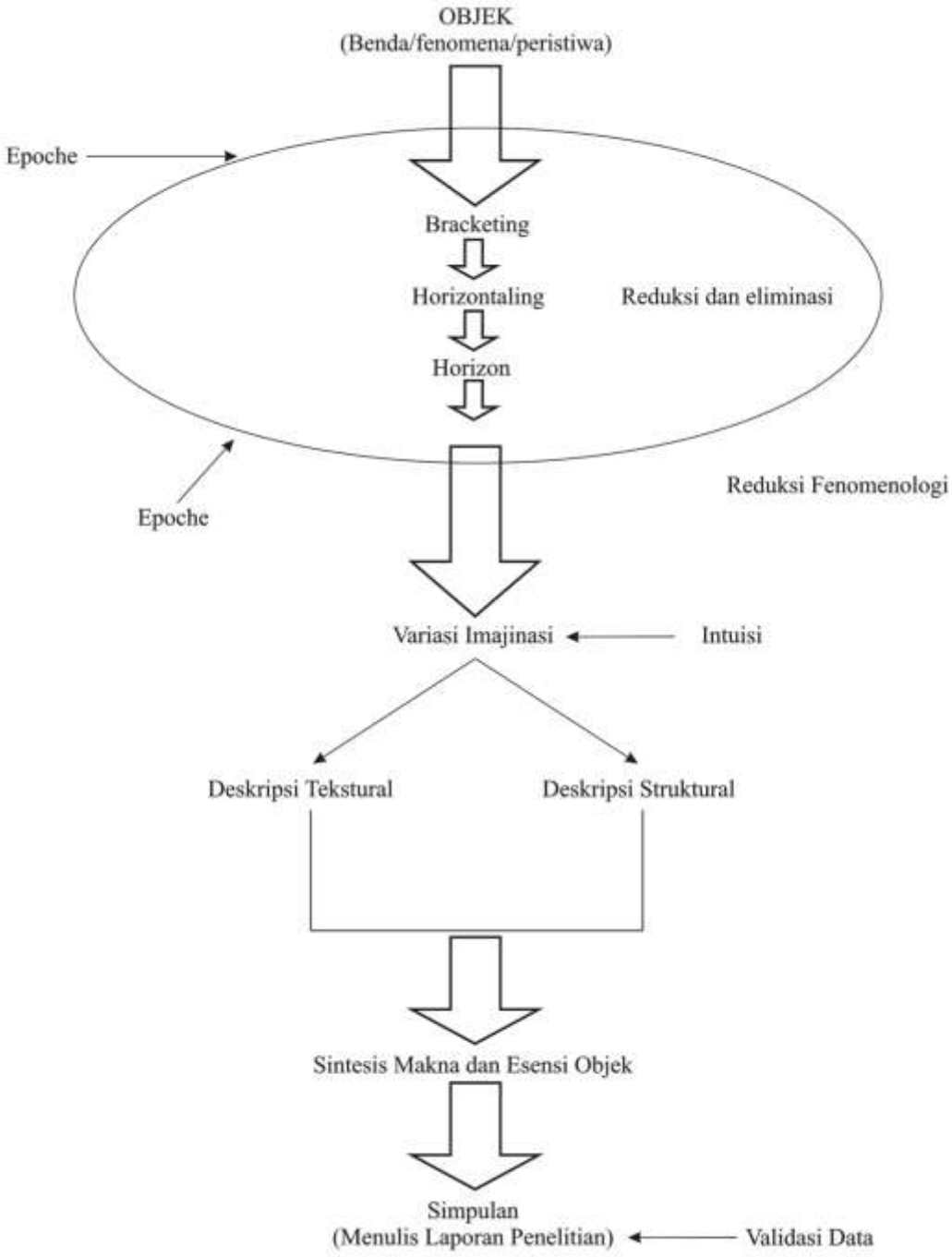

Gambar 1 Model Penelitian Fenomenologi
Sumber : Kuswarno (2009: 80)

Pengujian keabsahan data atau validitas data dilakukan dengan tujuan tidak adanya perbedaan data yang dilaporkan peneliti dengan data yang menjadi objek penelitian. Sugiyono (2013: 366) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diuji melalui uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan
   Metode ini peneliti lakukan kepada beberapa informan yang menurut pertimbangan peneliti perlu atau tidaknya dilakukan perpanjangan pengamatan. Peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan dari semula hanya empat informan kemudian menjadi enam dan akhirnya peneliti berhenti melakukan perpanjangan pengalaman pada informan kedelapan.

2. Peningkatan ketekunan
   Peningkatan ketekunan yang peneliti lakukan adalah dengan berulang kali mendengarkan rekaman wawancara bersama informan dan membaca berkali-kali transkrip wawancara yang telah dibuat serta membaca ulang hasil analisis data untuk memastikan kesesuaian pemaparan peristiwa berdasarkan wawancara dengan informan.

3. Triangulasi
   Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini merupakan pengecekan data melalui cara dan waktu yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu:
   a. Triangulasi sumber
      Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan jawaban antara informan satu dengan yang lain untuk mendapatkan keyakinan akan data yang diperoleh dari hasil wawancara.
   b. Triangulasi waktu
      Peneliti juga melakukan triangulasi waktu dengan membandingkan jawaban informan pada waktu yang berbeda.

4. Penggunaan bahan referensi
   Peneliti menggunakan referensi seperti jurnal-jurnal penelitian sejenis dan buku-buku yang mendukung pembuktian informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan.

5. Analisis kasus negatif
   Dalam tahap ini peneliti mencari dan menganalisis data yang berbeda dengan data yang telah diperoleh sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel. Peneliti juga menggunakan analisis kasus negatif untuk memperoleh keyakinan atas data dari informan.

6. *Member check*
   Member check dilakukan oleh peneliti ketika peneliti menulis laporan penelitian, peneliti menunjukkan transkrip dan hasil analisis data yang dibuat oleh peneliti kemudian informan memberikan *feed back* dalam bentuk saran dan koreksi atas tulisan peneliti sehingga meningkatkan keyakinan akan kesesuaian data yang diperoleh dari informan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut data World Bank dalam Transparency International di tahun 2009 memprediksi harapan hidup (*life expectancy*) Indonesia selama 68,47 tahun kedepan. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa saat ini di tahun 2015 sisa harapan hidup

Indonesia tidak sampai satu abad kedepan, penyebabnya tak lain adalah korupsi. Korupsi itu sendiri menurut ACFE merupakan salah satu bagian dari *fraud tree* yang menggambarkan skema dari bentuk-bentuk kecurangan disamping penyimpangan laporan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam beragam bentuk tersebut menjadi masalah bersama karena menimbulkan kerugian di segala aspek, tidak hanya materi tetapi juga aspek sosial. Sebagai warga negara yang cinta tanah air tentu berusaha untuk menjaga eksistensi dari negara tercinta, salah satunya dengan cara menjauhi segala bentuk kecurangan. Untuk menjauhi hal tersebut, perlu pemahaman tentang bagaimana *fraud* atau kecurangan itu terjadi.

Penelitian ini mencoba untuk memotret fenomena kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik, namun bagaimana jadinya bila harapan tersebut sejak awal sudah akrab dengan perilaku kecurangan? Sampai artikel ini ditulis, kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam LPJ masih dijumpai dan menjadi rahasia umum di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Berdasarkan penuturan para informan, mahasiswa sebagai pelaku kecurangan (*fraud prepetrators*) melancarkan aksinya dalam bentuk *fraudulent report* (penyimpangan laporan) yang didalamnya mencakup pemalsuan bukti transaksi, pemalsuan tanda tangan, serta *mark up* dan *mark down*.

Idealnya dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa di FEB UB proposal yang diajukan harus dapat merepresentasikan pelaksanaan kegiatan sehingga ketika saatnya LPJ mahasiswa mampu melaporkan LPJ yang sesuai dengan proposal. Namun dalam penerapannya ternyata hampir semua mahasiswa merasa kesulitan dalam pelaporan LPJ yang harus menyesuaikan dengan proposal karena berbagai alasan. Hal tersebut yang kemudian memotivasi mahasiswa untuk berpikir praktis dan instan dengan cara melakukan kecurangan dalam LPJ. Kecurangan dalam LPJ sendiri ditujukan selain untuk menyesuaikan LPJ dan proposal, tetapi juga didukung motivasi keuntungan yang diperoleh dari panitia atau organisasi ketika melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan kecurangan yang dilakukan mahasiswa, menganalisis penyebabnya dan bagaimana melawan praktik kecurangan yang dilakukan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan.

Potret Kecurangan Mahasiswa dalam LPJ

Tidak semua mahasiswa mengetahui bagaimana praktik pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa di FEB UB yang sebenarnya terjadi telah dibumbui dengan kecurangan oleh pelakunya yang berstatus mahasiswa. Seperti yang ceritakan oleh Ajeng kepada peneliti berikut,

Peneliti : Yang tau kamu *nge*lakukan kecurangan itu siapa aja Jeng?

Ajeng : Hmmm. semua anak inti pasti tau, temen-temenku juga *ga* semuanya tau sih, yang anak-anak organisasi aku rasa semuanya sih tau, yang pernah jadi inti, karna rata-rata semua acara pasti ada hal-hal kayak gitunya sih, cuman terkait besar kecilnya aja kebohongannya (Transkrip no. 3D).

Bangkit juga mengatakan hal serupa,

Peneliti : Kira-kira yang tau Mas Bangkit melakukan kecurangan itu siapa?

Bangkit : Panitia inti sama pengurus harian (Transkrip no. 2D).

Begitu pula penuturan Diesta,

Peneliti : Yang tau kamu kayak gitu, inti kayak gitu, siapa aja?

Diesta : Aku, inti.
Peneliti : Banyak yang tau kali ya?
Diesta : Enggak, aku, inti, sama bendahara.
Peneliti : Bendahara LO?
Diesta : Staf-staf ku ga ada yang tau, *he e*. Staf ku ga ada yang tau karna mereka kan, istilahnya apa ya mbak, acara selesai yaudah selesai, mereka ga *ngurus kayak* gitu jadi yang tau cuma inti-intinya aja (Transkrip no. 1D).

Penuturan dari Ajeng, Bangkit, dan Diesta menjelaskan bahwa tidak semua mahasiswa di FEB UB mengetahui bagaimana kecurangan dalam LPJ dana kegiatan mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa. Hanya panitia inti yang diamanahi oleh organisasi untuk menjalankan sebuah program kerja dan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan keuangan organisasi seperti ketua dan bendahara lembaga mahasiswa yang mengetahui dengan jelas bagaimana kecurangan LPJ terjadi.

Dari hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa mahasiswa biasanya melakukan kecurangan dengan pemalsuan tanda tangan, pemalsuan bukti transaksi, *mark up* atau *mark down*¸ serta penyalahgunaan dana kegiatan. Diesta, salah satu informan awalnya merasa cemas dan takut untuk membongkar kecurangan yang pernah dilakukannya ketika ditanya oleh peneliti, namun setelah peneliti meyakinkan untuk tidak perlu cemas, Diesta pun mulai membuka kartu,

Peneliti : Lah emang kecuranganmu apa aja dulu di kegiatanmu?

Diesta : Tanda tangannya peserta mbak, jangan dibocorin ya, hahaha nanti aku dimarahi sama bagian dekanat lagi, LPJ-nya kegiatanku ditarik.

Peneliti : Enggak kok, enggak.

Diesta : Ya itu, malsu tanda tangan peserta yang konsumsi, trus malsu tanda tangan penjual dan pembeli tapi notanya asli kok, cuman tanda tangannya aja karna kita emang *ngeburu* waktu sih, kalo ga gara-gara waktu mungkin kita bakal ke toko masing-masing buat minta tanda tangan (Transkrip no. 1D).

Pengakuan Diesta pun berlanjut,

Diesta : Pernah sempet, kita *pontang-panting nyarik* stempel toko. Jadi, dulu itu stempelnya tu harus ada nama toko sama alamatnya. Nah, waktu itu, konsumsi itu kan stempelnya hanya ada stempel lunas, nah, kita itu kan bingung kan mbak ya, trus akhirnya, tapi ini kejahatan *i* mbak. Yaudah, akhirnya kita minta nota kosong dari pihak lain yang punya stempel toko, yaudah.
... kemaren itu kita juga malsu tanda tangannya daftar hadir sama daftar konsumsi, jadi kemaren itu kita juga sempet bingung mbak mengenai konsumsi harus ada tanda tangan dari peserta konsumsi, panitia yang menerima konsumsi, pokoknya yang menerima konsumsi tu harus tanda tangan, nah kita itu nganggarin konsumsinya itu, lupa sih aku, sekitar 100 kalo ga salah. Nah yang dateng itu cumak 70 apa berapa gitu, nah sisanya, kita akhirnya malsu tanda tangannya pesertanya (Transkrip no. 1D).

Lain Diesta, lain juga dengan Bangkit, dengan santai Bangkit bercerita kepada peneliti tentang kecurangan yang pernah dia lakukan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bangkit, dana kegiatan mahasiswa yang dia ketuai berasal dari empat sumber dana kegiatan, yaitu dekanat, rektorat, sponsor, dan pendaftaran peserta. Dari keempat sumber dana tersebut ternyata menyisakan sejumlah rupiah sekitar tiga juta rupiah. Menurut Bangkit, sisa dana kegiatan tersebut biasanya diberikan untuk kas lembaga dan/atau digunakan untuk penutupan kepanitiaan biasanya dengan acara makan bersama seluruh panitia kegiatan. Dalam hal ini Bangkit mengaku bahwa sisa dana kegiatannya ia gunakan untuk penutupan panitia, keputusan tersebut diambil berdasarkan pendapat dari ketua pelaksana kegiatan seizin pengurus harian lembaga/organisasi mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Bangkit menjelaskan bahwa dana surplus atau sisa dana kegiatan mahasiswa muncul dari "permainan angka" yang dilakukan oleh panitia ketika mengelola keuangan kegiatan dengan memasukkan kebutuhan yang sudah ada pada anggaran sehingga dana yang seharusnya untuk kebutuhan yang dianggarkan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain dalam bentuk dana surplus.

Bangkit : Iya, *ngepres*, *pinter-pintere ngepres* pngeluaran kepanitiaan jadi bendaharanya harus *pinter-pinter ngepres*, ... kayak contohnya *printer* sama kertas-kertas buat prospektus atau buat LPJ tu dianggarkan total LPJ sama proposal itu sampe 500.000 padahal di organisasi itu udah ada yang namanya persediaan kertas folio sama *printer* jadi kan kita ga ngeluarin dari 500.000 itu kan jadi kita surplus disitu jadi kayak gitu permainan akun aja, akun pengeluaran biaya, *sebenere* tu sudah ada tapi kita masukkan (Transkrip no. 2D).

Agar lebih yakin, peneliti bertanya lagi

Peneliti : Padahal udah ada?

Bangkit : Padahal udah ada. Trus penyewaan *transport* mobil itu *sebenere* udah ada mobilnya, ga perlu nyewa tapi kita pake, kita masukin pengeluaran sebesar 250.000 kan 250.000 buat dua tiga hari kan, berarti tinggal *ngalikan* aja 700.000 sampe 1 juta bisa kita dapetin (Transkrip no. 2D).

Peneliti kemudian bertanya kepada Bangkit tentang regulasi yang mengatur sisa dana kegiatan mahasiswa ini,

Peneliti : Nah, kalo kayak gitu kan *istilahe pinter-pintere* Bendahara buat *nyurplusin* dana, maksud *e nyisain* dana, nah yang sisa itu kalo dari regulasi sendiri harusnya dibalikin apa harus habis?

Bangkit : Hahaha dari regulasi dekanat?

Peneliti : *He e*

Bangkit : Ga dibalikin, tapi alangkah lebih baiknya dikasih ke lembaga, soalnya lembaga gimana-gimana kalo dana DPP belom turun pasti di *back-up* sama kas kan, kalo kas ga ada, *sebenere* kas lembaga itu pemasukan terbanyak dari surplus kepanitiaan sama penjualan harian, kalo penjualan harian mungkin cuman 20% sampe 30% sumbangannya tapi kalo dana surplus, dana kegiatan itu bisa sampe 70% dan itu kalo seumpama dana kegiatan, misalnya KEGIATAN C yang levelnya nasional itu kan bisa sampe 2 juta 3 juta surplusnya, kayak KEGIATAN C kemaren,

surplusnya sampe 5 juta, itu kalo dikasih ke dana VENUS kan VENUS bisa punya kas banyak gitu lo, buat kepanitiaan-kepanitiaan yang mengalami defisit atau kekurangan DPP (Transkrip no. 2D).

Bangkit menerangkan tentang keberlanjutan sisa dana kegiatan mahasiswa berdasarkan regulasi yang berlaku. Menurut Bangkit, sisa dana kegiatan mahasiswa tersebut tidak perlu dikembalikan kepada dekanat, lebih baik diberikan kepada organisasi sebagai kas untuk menutup kekurangan dana dari kegiatan lain atau talangan dana untuk kegiatan yang dananya belum cair tapi sudah harus dijalankan. Bangkit juga memberikan ilustrasi tentang kas organisasi yang kebanyakan berasal dari surplus organisasi dan sebagian dari aktivitas kewirausahaan organisasi.

Kecurangan Mahasiswa dalam LPJ: Perspektif Teoretis Fraud Pentagon

Perkembangan teori tentang *fraud* membuktikan bahwa *Fraud Pentagon* mampu memberikan penjelasan secara lebih akurat dibandingkan dengan *Fraud Triangle*. Berdasarkan pemaparan informan, peneliti berusaha memaparkan penyebab kecurangan mahasiswa dalam LPJ secara lebih jelas berdasarkan teori *Fraud Pentagon* dari Jonathan Marks. Marks menjelaskan bahwa seseorang melakukan kecurangan karena dipicu oleh lima elemen yang terdiri dari arrogansi (*arrogance*), kompetensi (*competence*), kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Gambar 3 ***The Crowe Fraud Pentagon***
Sumber: Marks (2014: 6)

Arrogansi (*Arrogance*)

Marks menjelaskan arrogansi atau kesombongan seseorang dapat memprovokasi seseorang tersebut untuk melakukan kecurangan. Biasanya kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan kontrol yang ada tidak dapat menimpa dirinya sehingga pelaku kecurangan biasanya berpikir bebas untuk melakukan kecurangan tanpa takut akan adanya sanksi yang akan menjeratnya.

Dalam penelitian ini, arrogansi muncul pada diri informan mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa dirinya bebas dari sanksi apapun ketika melakukan kecurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa. Seperti yang tercermin dalam jawaban Bangkit berikut

Peneliti : Kira-kira dari dekanat sendiri ada sanksi ga sih kalo misalnya ketauan curang atau apa? ...

Bangkit : Permainan angka? Enggak, ga ada peraturan tentang itu (Transkrip no. 2D).

Bangkit menambahkan bahwa kecurangan yang dilakukannya wajar dilakukan karena dari dekanat sendiri tidak ada aturan yang mengharuskan dana kegiatan harus habis terpakai untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga ketika ada surplus dan surplus tersebut tidak jelas sumber dananya dari mana kemudian masuk kas organisasi atau untuk *have fun* belaka, Bangkit merasa yakin untuk memanipulasi LPJ sesuai dengan proposal meskipun sebenarnya realisasi penggunaan dana masih ada sisa.

Bangkit : ... dibilang wajar sih wajar soalnya dekanat ga ngasih aturan kalo dana 10 juta itu harus habis sehabis-habisnya, ya emang habis, cuman kita kan kalo surplus kan 1 juta kan, "Emang itu uangnya dekanat?" Kan kita dari empat sumber pemasukan, kalo 1 juta ini bias gitu loh (Transkrip no. 2E).

Sifat angkuh pelaku kecurangan LPJ itu juga berkembang dari pengalaman dan pemikiran tentang senior yang juga melakukan kecurangan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal ini membuat mahasiswa merasa lebih percaya diri untuk melakukan kecurangan dalam LPJ. Seperti yang terlihat dalam penuturan Bangkit berikut

Bangkit : *Toh*, juga mereka yang jadi patokan kita ga dihukum trus kenapa kita yang dihukum? (Transkrip no. 2E).

Kecurangan mahasiswa yang dipicu oleh arrogansi juga terlihat dalam percakapan berikut,

Bangkit : *He e, sebenere* ga kembali ke dekanat pun *gapapa soale* dekanat *taune* cuman 10 juta, *mbok* pake buat apa terserah yang penting 10 juta itu ga minta tambah.

Peneliti : Berarti ga ada peraturan buat sisa dana itu harus kembali ke dekanat?

Bangkit : Ga ada, sekarang pun masih ga ada, tahun dulu juga ga ada, pokok *e* dekanat ga rugi, pokok *e* yang dikasih rektorat keluarnya sama kayak yang diminta, *intine* ga lebih, jadi dipake buat kas *e* VENUS, kas lembaga atau kas buat *seneng-seneng* (Transkrip no. 2D).

Dari percakapan diatas menunjukkan bahwa arrogansi mahasiswa terlihat jelas terkait keyakinan akan pengendalian internal yang lemah dan tidak akan menimpa dirinya. Tidak adanya peraturan terkait sisa dana kegiatan dan sistem pengendalian yang lemah terhadap perilaku kecurangan mahasiswa mendorong informan untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan sisa dana kegiatan sebagai kas organisasi atau hanya untuk kepentingan "senang-senang".

Kompetensi (*Competence*)

Marks menjelaskan elemen kedua yang memicu seseorang melakukan kecurangan adalah kompetensi. Marks mengartikan kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menembus pengendalian internal yang ada, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungannya dengan mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama.

Dalam fenomena kecurangan mahasiswa pada pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan, kompetensi ditunjukkan dari kreativitas dan kepiawaian mahasiswa dalam praktik kecurangan LPJ sehingga ada keuntungan yang didapat dari perilaku kecurangan yang dilakukan seperti tergambar dalam pernyataan Bangkit berikut

Bangkit : ... *pinter-pintere ngepres* pngeluaran kepanitiaan jadi bendaharanya harus *pinter-pinter ngepres*, kan disitu, kan ada ya,

> oh ya jadi satu kasus itu, ada satu, aku pengeluaran *sebenere* sudah ada di VENUS kayak contohnya *printer* sama kertas-kertas buat prospektus atau buat LPJ tu dianggarkan total LPJ sama proposal itu sampe 500.000 padahal di organisasi itu udah ada yang namanya persediaan kertas folio sama *printer* jadi kan kita ga ngeluarin dari 500.000 itu kan jadi kita surplus disitu jadi kayak gitu permainan akun aja, akun pengeluaran biaya, *sebenere* tu sudah ada tapi kita masukkan (Transkrip no. 2D).

Jadi seorang bendahara kegiatan harus memiliki kemampuan dan "pintar" dalam meminimalkan pengeluaran serta cerdik dalam menyusun proposal. Dengan begitu akan ada keuntungan yang didapat dari dana kegiatan yang berasal dari dekanat. Kemampuan tersebut yang kemudian menjadi kompetensi seorang mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam LPJ.

Dalam fenomena ini, kompetensi tersebut sebenarnya muncul dari budaya yang telah diwariskan oleh senior di organisasi, dimana para senior tersebut lebih dulu mengalami kondisi yang serupa dan memberikan saran kepada juniornya untuk melakukan kecurangan yang sama, seperti yang diutarakan oleh Bangkit berikut

Bangkit : Budaya, budaya itu dari senior, soalnya kita kan ada yang namanya *controlling* dari alumni. *Controlling* dari senior tahun sebelumnya, nah mereka itu biasanya ngasih solusi kalo misalnya menemukan kendala di keuangan trus mereka ngomong, "Pengalamanku dulu loh kayak gini dek, kita pakek dana dari dekanat iya, kita pake dari sponsor iya, tapi kita juga ada tambahan dana rektorat."

Trus ada juga yang, "Kamu masukin aja kebutuhan yang sebenernya udah ada kayak *printer*, kebutuhan *nge-print* trus kebutuhan jilid, kebutuhan transport itu masukin aja." Trus *sebenere* udah ada itu sebenere (Transkrip no. 2E).

Bangkit juga menambahkan

Bangkit : Iya, soalnya saya dulu dikasi taunya di acara sama yang dulu-dulu jadi cara mainnya kayak gitu, bahkan saya diantar sama Irwan yang waktu itu Ketua Pelaksananya acara tahun sebelumnya ke rektorat.

Bahkan diantar langsung, "Ayok Kit, minta dana ke rektorat aja *lek awakmu* defisit." Akhirnya aku di antar ke rektorat.

Jadi budaya turun-temurun, pun sekarang saya juga demikian juga mengajarkan ke Selly, adek tingkat saya, untuk melakukan yang seperti itu (Transkrip no. 2E).

Apa yang diungkapkan oleh Bangkit sesuai dengan definisi kompetensi yang dipaparkan oleh Marks bahwasanya kompetensi merupakan kemampuan untuk menembus pengendalian internal dan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan kecurangan yang sama. Kecurangan mahasiswa dalam LPJ muncul didorong oleh pengaruh senior yang kemudian diwariskan secara berkelanjutan kepada juniornya sehingga membentuk suatu budaya kecurangan. Hal ini juga diakui oleh Ajeng yang juga melakukan kecurangan karena pengaruh senior,

Ajeng : Sebenernya *ngelakuin* kecurangan itu awalnya emang dari peraturan dan dari senior yang udah *ngelakuin* juga, maksudnya saran, "Gimana kalo gini aja, gimana kalo gitu aja." Dan akhirnya

kita terbawa untuk ngelakukan hal-hal kayak gitu itu soalnya dari pengalaman pertama dari baksos (Transkrip no. 3D).

Berdasarkan penjelasan Ajeng, unsur kompetensi mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan dengan sendirinya tanpa terkendali, seperti yang tergambar dalam percakapan berikut

Peneliti : Trus kamu kan tadi awalnya dari kakak tingkat yang *ngasih* saran, kira-kira kamu sekarang ke adek-adek tingkat itu kalo misalnya *ngurusin* LPJ-an *ngasih* saran gitu juga?

Ajeng : Ga *ngasih* saran sih, jadi kebawa mbak. Soalnya kan gini, kayak misalnya baksos atau kegiatan aku udah terbiasa kayak gitu, trus tiba-tiba muncul masalah di kegiatan kepenulisan yang rekanku itu kan dibawahku dan mereka itu ga *bo'ong* dan mereka juga udah tau gitu loh kayak gitu, jadi memang entah mereka tau dari mana, yaudah kita kayak udah terbentuk.
Jadi, "Kayak gini aja, kayak gini aja." Kayak gitu.
Jadi yaudah, "Palsuin aja tanda tangannya." Kayak gitu, jadi ya,

Peneliti : Jadi kayak itu, ya udah?

Ajeng : Udah terbudaya.

Peneliti : Berarti budaya juga berdasarkan pengalaman juga?

Ajeng : Karna faktor dari pengetahuan dan intuisi juga sih kayaknya, soalnya kan kalo dalam kita keadaan tertekan harus diselesai-in berapa bulan sebelum ini, biasanya kan LPJ itu seminggu setelah acara harus udah masuk ke dekanat. Lah kan posisinya udah kadang-kadang defisit, *amburadul*, bingung dari sini salah, dari situ salah. *Akhire* ya intuisi kita untuk mengatakan, "Ya udah *bo'ong*." (Transkrip no. 3E).

Kompetensi atau kemampuan untuk melakukan kecurangan dalam LPJ telah menyatu dalam budaya yang diwariskan dan memberikan pengaruh secara langsung dengan sendirinya. Sehingga mudah bagi mahasiswa untuk melakukan kecurangan karena dorongan kompetensi yang menyatu dengan budaya kecurangan LPJ yang ada dalam satu organisasi mahasiswa.

Kesempatan (*Opportunity*)

Elemen ketiga dalam *Fraud Pentagon* mampu memprovokasi mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam LPJ adalah kesempatan (*opportunity*). Dalam publikasi *white paper*-nya Marks menjelaskan bahwa kesempatan merupakan suatu kondisi yang timbul akibat lemahnya pengendalian terhadap kecurangan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat terbukanya kesempatan bagi para mahasiswa pelaku kecurangan LPJ yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan aksinya

Peneliti : *Eh*, ini ga sih Jeng, ada sanksi ga sih kalo buat lembaga itu yang *ngelakukan* kecurangan? Ketahuan curang?

Ajeng : Sampe sekarang sih ga pernah di *share* yang kayak gitu, maksudnya kepalsuan terkait kecurangan. Dekanat cuman membuat peraturan yang harus kita lakuin, tapi belom ada sanksi tertulis gitu dari dekanat kalo melanggar peraturan yang ini ada sanksi apa (Transkrip no. 3E).

Berdasarkan pengakuan Ajeng tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi yang jelas ketika mahasiswa melakukan kecurangan dalam LPJ. Hal ini juga didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh PR dan BN, sebagai berikut

Peneliti : Kalo misalnya kayak tadi itu Pak, *nge*pasin kan tadi itu, itu ada sanksi apa ga sih Pak, sebenernya?
PR : *Nge*pasin gimana? 4 juta keluarnya 4 juta, gitu?
Peneliti : Keluarnya 4 juta, sebenernya dia *real*-nya yang dibelanjakan cuman 3 juta,
BN : Ya pokoknya kan kita liatnya dari notanya.
Peneliti : Oh gitu,
PR : *Nge*lihatnya dari buktinya ini, stempel dan harganya itu 4 juta, ya udah 4 juta.
BN : Nah, perkara kalo itu nanti mereka mau malsu, ya sudah kasih notanya, kan yang kita lihat adalah dari notanya ini *valid* atau tidak, ada stempelnya atau enggak, ada tanda tangan (Transkrip no. 7N8).

Dari penjelasan kedua beliau tersebut, terlihat bahwa tidak ada peraturan yang menjelaskan tentang tindak lanjut dari kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan, yang menjadi perhatian khusus dari dekanat adalah validitas dari bukti transaksi yang ada pada LPJ kegiatan yang dipertanggungjawabkan kepada dekanat, bukan dari palsu atau tidaknya laporan yang ada. Dari situ kesempatan kecurangan yang muncul adalah ketika mahasiswa mampu memberikan nota yang valid berdasarkan ketentuan dari dekanat, meskipun sebenarnya nota tersebut palsu sehingga kesempatan kecurangan terbuka lebar. Kondisi tersebut juga diyakinkan dari percakapan singkat peneliti dengan BN berikut

Peneliti : Jadi yang dilihat itu bukti yang ada itu ya Mbak, ya?
BN : Iya dong (Transkrip no. 7N8).

Kesempatan kecurangan mahasiswa juga hadir didasari oleh kondisi pengendalian yang lemah dari dekanat sebagai berikut

Peneliti : Temen saya yang saya wawancarai itu mbak, itu ada dua *macem* mbak, jadi ada yang sisa dananya itu buat *seneng-seneng*, ada yang dia sisa dananya itu dibuat kepentingan lembaganya sendiri, kayak gitu, nah itu gimana?
BN : Nah kalo sudah seperti itu ya sebenernya kita sudah, sudah lepas dari kami, maksudnya begini, misalnya nih saya kasih anggarannya katakanlah 5 juta gitu ya, kemudian mereka memaksakan diri untuk menjadi 5 juta persis, meskipun saya tau mungkin mereka itu ada saving sekitar 700 ribu, kemudian sama mereka dibuat untuk seneng-senengnya 400, yang 300-nya untuk lembaga, ya sudah, itu kan sudah di, sudah menjadi kesepakatan lembaganya mereka (Transkrip no. 7N8).

Berdasarkan penjelasan BN yang juga telah peneliti bahas pada bab sebelumnya, dekanat tidak memiliki kontrol atas sisa dana kegiatan mahasiswa, sehingga apabila ada suatu kegiatan yang kemudian dananya masih ada lebihnya, dana tersebut sudah menjadi hak kelola dari organisasi penyelenggara kegiatan sehingga apabila terdapat kecurangan dalam pelaporan sisa dana tersebut dekanat tidak dapat mengambil tindakan apapun selama validitas bukti transaksi terpenuhi meskipun sebenarnya bisa jadi bukti transaksi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Lemahnya kendali dekanat atas praktik kecurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam penyalahgunaan dana maupun manipulasi LPJ.

Tekanan (*Pressure*)

Marks dalam publikasi *white paper*-nya yang berjudul *Playing Offense in a High-Risk Environment* menyebutkan elemen keempat dalam *Fraud Pentagon* ialah tekanan (*opportunity*). Tekanan didefinisikan oleh Marks sebagai suatu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan berikut, mereka menyatakan bahwa kecurangan yang mereka lakukan juga disebabkan oleh adanya tekanan, baik dari kondisi keuangan, lingkungan, maupun peraturan. Seperti yang disampaikan oleh Diesta berikut bahwasanya dirinya melakukan kecurangan karena merasa terpaksa oleh regulasi yang kemudian mendorong dirinya untuk melakukan kecurangan dalam LPJ.

Diesta : ... ada hal-hal tertentu yang harus dipaksakan sesuai sama regulasi.
Peneliti : Oooh, berarti kalo kecuranganmu, kecurangan terpaksa?
Diesta : Iya hahaha. Kecurangan terpaksa ga kecurangan yang sengaja mbak, tak lebih-lebih kan, enggak sih, cuma gara-gara regulasinya aja jadi kita terpaksa *ngelakuin* itu (Transkrip no. 1D).

Diesta mengaku bahwa dirinya melakukan kecurangan karena mendapat tekanan dari peraturan yang ada. Diesta juga menambahkan penjelasannya tentang tekanan peraturan yang dihadapi oleh dirinya berikut ini,

Diesta : ... misalkan ga perlu tanda tangan penjual, yaudah kita kan ga mungkin malsu kan. Trus konsumsi, kalo misalkan peserta ga hadir, yaudah *gapapa*, yaudah kita ga perlu malsu itu mbak hehe (Transkrip no. 1E).

Diesta mengaku apabila tidak ada peraturan mewajibkan tanda tangan penjual dan konsumsi dirinya tidak akan melakukan pemalsuan dalam LPJ dana kegiatan mahasiswa. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Ajeng,

Ajeng : ... sempet ada kejadian di proposal itu kita itu nulis, *eh*, kita itu *mesen* konsumsi sebesar 60, mau ga mau konsumsi itu harus habis tapi pada dasar kenyataannya yang kita targetin 60 itu ga hadir semua, yang hadir tu cuman 50 orang, mau ga mau tanda tangan harus ada semua dong 60-nya, agar terbukti kue yang kita pesen tu habis. Terpaksa tanda tangannya itu kita palsuin, kalo terkait anggaran, ya itu tadi, kita palsuin masalah nota (Transkrip no. 3D).

Menurut Ajeng untuk membuktikan konsumsi yang dipesan sesuai dengan yang dianggarkan, dia terpaksa memalsukan beberapa tanda tangan peserta karena jumlah peserta yang hadir ternyata tidak sesuai dengan estimasi panitia.

Berbeda dengan Bangkit yang berpendapat bahwa tekanan seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan. Menurut Bangkit ketika seorang mahasiswa berada dalam lingkungan kecurangan maka dengan sendirinya akan terbawa untuk melakukan kecurangan hal ini disebabkan adanya tekanan dari lingkungan disekitarnya, seperti yang dikatakannya berikut

Bangkit : ... menstimulus pribadi orang untuk berperilaku sesuai lingkungannya, kalo lingkungannya curang, ya curang (Transkrip no. 2E).

Ajeng juga memiliki pendapat sendiri, menurutnya peraturan tetap menjadi alasan seorang mahasiswa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan dalam LPJ, seperti dalam percakapan peneliti dengan Ajeng berikut ini

Peneliti : Nah, trus yang tadi LPJ harus disamain sama proposal, nah itu menurutmu gimana?

Ajeng : Ya, itu secara ga langsung bikin kita terpaksa harus *bo'ong*, ya kan tadi aku bilang, kalo misalnya anggaran itu kadang-kadang ga selamanya sama (Transkrip no. 3C).

Menurut Ajeng pelaksanaan kegiatan yang tidak selalu sama dengan rencana membuat dirinya kesusahan untuk menerapkan peraturan yang ada sehingga dirinya merasa terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam LPJ guna menyesuaikan LPJ dengan proposal. Ajeng mengaku dirinya tidak ingin melakukan kecurangan tersebut, namun apa daya karena peraturan tersebut harus ditaati sehingga dirinya terpaksa untuk melakukan kecurangan agar LPJ kegiatannya diproses oleh dekanat.

Ajeng : Sebenernya tu juga ga mau tapi tuntutan dari dekanat yang mengharuskan kita seperti yang jadinya membuat kita harus ngelakukan kecurangan itu, ya ga bisa menyalahkan dekanat juga sih karna kan kita yang membuat acara juga kan jadi kita juga bingung harus *ngelakuin* apa kayak gitu, kita sih mengusahakan untuk ga melakukan kecurangan tapi kalo misalnya terpaksa harus melakukan, ya kita, ya mau ga mau harus *ngelakuin* (Transkrip no. 3D).

Tekanan-tekanan yang sudah peneliti jelaskan berdasarkan penuturan dari pengalaman informan menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan mahasiswa dalam LPJ dana kegiatan dipicu oleh adanya tekanan baik dari peraturan maupun dari lingkungan mahasiswa itu sendiri.

Rasionalisasi (*Rationalization*)

Elemen terakhir dalam *Fraud Pentagon* yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan adalah rasionalisasi. Rasionalisasi (*rationalization*) sendiri dijelaskan oleh Marks sebagai pemikiran untuk membenarkan perilaku kecurangan yang sedang dipikirkan seseorang atau yang sudah terjadi.

Ada banyak alasan mahasiswa dalam rasionalisasinya melakukan kecurangan pada pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa. Pertama pendapat dari Bangkit yang mengatakan bahwa kecurangan yang dilakukannya bisa ditolerir karena masih dalam batasan yang wajar. Bangkit sendiri meyakini bahwa kecurangan yang dilakukannya dalam proses LPJ tidak merugikan pihak lain baik dekanat atau pun rektorat sehingga dirinya merasa tidak masalah untuk melakukan kecurangan tersebut, seperti penuturan singkat Bangkit berikut ini

Bangkit : ... jadi masi dibilang wajar soalnya ga merugikan sama sekali, ga merugikan pihak dekanat sama rektorat (Transkrip no 2E).

Bangkit menjelaskan lagi terkait pembenarannya melakukan kecurangan. Dia beranggapan bahwa kecurangan yang dilakukannya sebagai mahasiswa ditujukan untuk keuntungan dari organisasi dan kegiatannya tetapi tidak merugikan pihak lain. Menurut Bangkit kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa masih dalam batas wajar karena tidak melampaui batasan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Bangkit menambahkan bahwa kecurangan yang dilakukannya tidak seperti koruptor sehingga masih dapat ditolerir. Berbeda kondisinya apabila kecurangan kemudian dilakukan di dunia kerja, hal tersebut akan merugikan banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Bangkit : Oke *gapapa* mbak, kan ini kan lingkup, kembali ke lingkup mahasiswa. Kalo lingkup mahasiswa itu kita tu curang, curangnya bukan untuk curang menjatuhkan, sekali lagi kita tu curangnya untuk menguntungkan kita tapi ga merugikan orang lain, itu curangnya mahasiswa yang sekarang lagi membudaya banget, iku

kecurangan LPJ. Sekali lagi LPJ itu adalah sama sekali tidak merugikan dekanat ... Bisa curangnya mahasiswa itu, curangnya bukan sampe koridor yang melampaui batas agama dan batas kemasyarakatan, jadi ga sampe nakal senakal yang kayak koruptor, ya enggak. Beda kalo yang dunia kerja, yang dunia kerja itu merugikan banyak pihak gitu loh, baik itu pemerintah dan masyarakat (Transkrip no. 2E).

Peneliti kembali meyakinkan rasionalisasi dari Bangkit dan jawabannya tetap sama, praktik-praktik kecurangan mahasiswa tidak apa-apa dilakukan karena masih dalam koridor yang wajar, seperti yang tersurat dalam percakapan berikut ini

Peneliti : Menurut Mas Bangkit budaya yang kayak gitu *gapapa*?
Bangkit : *Gapapa, gapapa.*
Peneliti : Praktek-praktek kecurangan?
Bangkit : *Gapapa.*
Peneliti : Kenapa?
Bangkit : Koridornya masih wajar (Transkrip no. 2E).

Berbeda dengan pendapat Ajeng berikut ini yang melakukan kecurangan dalam bentuk pemalsuan karena menyesuaikan dengan anggaran tetapi sebenarnya keseluruhan dana kegiatan memang dihabiskan untuk kebutuhan bakti sosial. Ajeng mengaku tidak ada sepeser pun uang yang masuk ke perut panitia. Pemalsuan yang dilakukan oleh Ajeng semata-mata hanya untuk kepentingan memenuhi regulasi dari dekanat, karenanya Ajeng beranggapan bahwa kecurangan yang dilakukannya benar dilakukan.

Ajeng : Jadi sebenernya kita pemalsuan di dekanat itu emang anggarannya kita sesuai-in karna permintaan dekanat, tapi sebenernya kalo uang tu, semuanya tetep kita kasihin ke orang yang emang kita sasar itu, ga ada sedikit pun uang yang kita makan (Transkrip no.3E).

Keempat elemen yang telah dijelaskan diatas ditambah dengan pembenaran-pembenaran dari para informan menunjukkan bahwa kelima elemen dalam *Fraud Pentagon* menyebabkan seorang mahasiswa melakukan kecurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa di FEB UB.

Kejujuran dalam LPJ, Kenapa Tidak?

Berbeda dengan informan mahasiswa yang mengaku pernah melakukan kecurangan dalam LPJ, Adit, salah satu informan menuturkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kecurangan dalam LPJ kegiatan yang diketuai oleh dirinya. Menurut Bangkit terdapat perbedaan antara peraturan saat dia masih mengurusi LPJ dan yang terbaru saat ini. Menurutnya, peraturan yang berlaku dulu membebaskan mahasiswa untuk melaporkan dana kegiatan sesuai dengan realisasi kegiatan baik dana tersebut kurang atau lebih, sedangkan peraturan yang berlaku sekarang mengharuskan LPJ sesuai dengan proposal dana kegiatan yang diajukan, tidak boleh lebih atau bahkan kurang.

Peneliti : *Pas* waktu dulu kalo misalnya surplus itu LPJ *ne piye* Dit?

Adit : Kalo dulu? Itu masuk kas, trus nanti pas LPJ-nya lembaga ke dekanat itu dilaporkan disitu (Transkrip no. $4C_1$).

Adit juga menambahkan,

Adit : ... jadi ada pemasukan kas organisasi karena surplus kayak gitu (Transkrip no. $4C_1$).

Adit menerangkan bahwa peraturan sebelumnya mendukung LPJ yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan, baik dana kegiatan mengalami kekurangan atau kelebihan akan dilaporkan sesuai realita. Ketika dana kegiatan mahasiswa itu mengalami kelebihan maka ada informasi dalam LPJ yang menyatakan tentang pemasukan kas organisasi yang disebabkan oleh sisa dana kegiatan yang berlebih itu. Hal ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi dibandingkan harus melakukan *mark up* dana kegiatan dengan tujuan yang sama.

Selanjutnya peneliti bertanya,

Peneliti : Jadi kalo biasanya kan kalo di lembaga-lembaga lain *dipas-pasno* kan *ben mlebu* kas *e* lembaga, tapi *lek nang* organisasimu berarti *laporane yo* laporan surplus *ngunu iku*?

Adit : Mau surplus atau defisit ya dilaporkan seadanya (Transkrip no. $4C_1$).

Adit menjelaskan kepada peneliti bahwa organisasinya memupuk kejujuran dalam mengurus LPJ, berbeda dengan organisasi mahasiswa kebanyakan di lingkungan FEB UB.

Peneliti : Berarti kalo di organisasimu itu udah dibudayakan kalo LPJ itu harus jujur sesuai sama realitanya kan? Lah yang mendorong harus jujur itu kenapa?

Adit : Kalo namanya kan organisasiku sendiri adalah lembaga dakwah ya, kalo dakwah itu harus memperbaiki diri sendiri dulu baru bisa berdakwah ke orang lain. Lah kalo misal dari hal kecil kayak nata diri sendiri belom bisa bener, kok berani-beraninya jadi anggota dakwah di FEB ini. Jadi dari sendiri itu harus diperbaiki dulu, dari hal kecil seperti ini kalo sudah lebih baik baru kita bisa berdakwah gitu. Jadi kayak kebohongan atau pencurian, kayak gitu itu hal yang tabu di organisasiku (Transkrip no. $4C_1$).

Organisasi mahasiswa yang diikuti oleh Adit adalah lembaga dakwah, organisasi yang bergerak di bidang kerohanian. Adit mengatakan bahwa untuk berdakwah sudah sepantasnya memperbaiki diri sendiri dari hal kecil seperti kebohongan dan pencurian, sehingga dalam LPJ pun organisasinya mendorong untuk mengutamakan kejujuran. Adit menjelaskan bahwa kejujuran dalam LPJ dapat terwujud di organisasinya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang berbeda dengan organisasi lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud Adit dalam hal ini adalah akhlak dari masing-masing individu.

Peneliti : ... dirimu kok bisa ga melakukan kecurangan itu penyebab *e* apa?

Adit : *Sebenere* kalo, kan dari organisasi sendiri, ya mereka kalo kita harus biasakan jujur, harus jujur ... kalo *misale* memang ga dianggarkan kayak ini *misale* kan sering bensin tidak dianggarkan kalo ga dianggarkan itu bener-bener ga dipasang kalo ada *survey* gitu yaudah kan karna belom nganggarin berarti pake uang sendiri-sendiri, pernah itu *survey* ke Coban Rais kan berangkat siang pulang *e* malem, itu ngisi bensin pake uang panitia sendiri trus kan uang makan, perlu makan, pake uang sendiri soalnya kan emang ga dianggarin untuk *survey* itu (Transkrip no. 4D).

Adit menjelaskan organisasi yang mengutamakan kejujuran menyebabkan dirinya tidak melakukan kecurangan dalam LPJ apabila tidak dianggarkan di proposal juga tidak dilaporkan dalam LPJ. Untuk kebutuhan tak tertuga, Adit menerangkan bahwa hal

tersebut adalah tanggungjawab panitia pribadi tidak dibebankan kepada dana kegiatan mahasiswa karena tidak dianggarkan di awal.

Adit menambahkan penjelasannya tentang yang mendorong dirinya memprioritaskan kejujuran karena pengalaman pribadinya saat masih kecil yang pernah melakukan kecurangan tapi berujung kerugian. Kemudian Adit bertekad untuk menomorsatukan kejujuran dalam segala perilakunya.

Adit : Sebenernya kalo dari dulu iku namanya manusia ya pasti pernah, normalnya pasti pernah berbohong kan. Kalo dari kecil itu saya pernah bohong tapi kalo bohong itu pasti ketauan, lah itu satu hal yang membuat saya kapok untuk berbohong. Yang kedua *iku* masalah nyontek, itu kan sering dan pasti terjadi, jadi dulu saya pernah nyontek kan, ternyata akibat dari ketidakjujuran itu hasil yang saya dapet sangat jelek, lah saat memulai perubahan, memulai kejujuran dengan tidak mencontek *iku* ternyata hasilnya lebih baik, kayak gitu. Jadi saya tertanam di diri saya, "Oh kalo kejujuran *iku* meskipun keadaannya kayak gimana lebih baik sangat penting untuk diterapkan." Kayak gitu (Transkrip no. 4E).

Peneliti kemudian menelisik apa yang membentuk pemikiran Adit,

Adit : Jadi kalo aku sebutkan satu-satu *iku* banyak, jadi memang didikan orang tua *iku* jelas. Trus doa orang tua untuk anaknya lebih baik *iku* jelas, pasti akan, insyaAllah ada. Trus dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di lingkup sosial atau masyarakat atau di instansi pendidikan *iku* juga terjadi, juga yang membuat saya itu mikir, "Nyontek itu ga perlu, nyontek *iku* kebahagiaan semata, akhirnya kedepan bakal jelek." Kayak gitu.
Trus kalo saya sendiri menganggap itu, saya hubungkan dengan ibadah. Kalo kita ibadah, kualitas ibadah kita tinggi, kita itu dijauhkan dari hal-hal semacam itu jadi yang dimaksudkan, kita itu dikuatkan dalam hal ibadah dan dalam ibadah keprilakuan kita itu sehari-hari *iku* otomatis udah dijaga oleh ALLAH SWT kayak gitu (Transkrip no. 4E).

Adit menuturkan, pengalamannya yang membentuk dirinya memiliki pemikiran seperti itu. Selain itu juga didikan dari orang tua dan doa yang baik dari orang tua yang memberi pengaruh kebaikan kepada anaknya. Adit juga berucap bahwa kualitas ibadah juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian Adit menambahkan,

Adit : Ya kalo melakukan ketidakjujuran *iku* rasanya emang awal-awal *iku* kayak hati *iku* awal-awalnya tenang tapi nanti-nantinya, lama-lama jadi berat, jadi berat, kayak gitu (Transkrip no. 4E).

Adit menjelaskan perasaannya tentang kecurangan. Menurutnya manusiawi ketika melakukan kecurangan di awal akan merasa nyaman tapi kemudian meninggalkan kecemasan dan ketidaknyamanan di akhir.

Simpulan

Idealnya dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa di FEB UB proposal yang diajukan harus dapat merepresentasikan pelaksanaan kegiatan sehingga ketika saatnya LPJ mahasiswa mampu melaporkan LPJ yang sesuai dengan proposal. Namun dalam penerapannya, ternyata mahasiswa masih menemui banyak kendala. Kecenderungan mahasiswa akan mencari solusi dari kendala yang dihadapi dengan cara praktis dan instan, yakni dengan melakukan kecurangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa di FEB UB dalam pelaporan

pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa ialah dengan melakukan pemalsuan, baik tanda tangan maupun bukti transaksi yang wajib dilampirkan dalam LPJ, disamping itu juga melakukan *mark up* / *mark down* dan ada kalanya pula mahasiswa menyalahgunakan dana kegiatan untuk kepentingan yang lain.

Berdasarkan pemaparan informan, peneliti menemukan bahwa penyebab kecurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa dilihat dari perspektif teori *Fraud Pentagon* adalah sebagai berikut:

1. Arrogansi (*arrogance*)
   - Percaya diri dari pengalaman senior yang juga pernah melakukan kecurangan dan tidak ada masalah yang ditimbulkan.
   - Keyakinan mahasiswa akan tidak adanya sanksi untuk pelaku kecurangan dalam LPJ dana kegiatan.
   - Tidak ada aturan yang jelas terkait sisa dana kegiatan mahasiswa.
2. Kompetensi (*competence*)
   - Jabatan strategis sebagai Ketua/Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, dan Bendahara Pelaksana.
   - Intuisi dan kecerdikan mahasiswa dalam solusi praktis dan instan.
   - Kecurangan dalam LPJ yang sudah membudaya di lingkungan organisasi mahasiswa FEB UB.
3. Kesempatan (*opportunity*)
   - Kondisi tidak adanya sanksi dari pihak dekanat bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam LPJ dana kegiatan.
   - Selama bukti di LPJ valid, tidak ada masalah dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa, meskipun bukti valid tersebut diperoleh dengan melakukan kecurangan.
   - Kendali penuh atas sisa dana kegiatan berada di tangan mahasiswa.
4. Tekanan (*pressure*)
   - Tekanan dari peraturan dan birokrasi yang mengharuskan LPJ sesuai dengan proposal.
   - Tekanan dari lingkungan organisasi mahasiswa.
5. Rasionalisasi (*rationalization*)
   - Masih dalam batasan wajar dan tidak merugikan.
   - Adanya pemikiran simbiosis komensalisme pada mahasiswa yang menganggap bahwa organisasi untung dan tidak ada pihak yang rugi.
   - Hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi.
   - Hanya untuk kepentingan lembaga/organisasi mahasiswa bukan untuk senang-senang panitia.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa satu hal yang dapat mencegah mahasiswa dari perilaku kecurangan yaitu agama yang tercermin dalam akhlak seseorang. Di tengah lingkungan kecurangan yang ada di kalangan mahasiswa organisator FEB UB, pengendalian internal yang wajib dimiliki oleh masing-masing mahasiswa adalah agama yang mampu membimbing individu untuk menghindar dari perilaku kecurangan. Karena perilaku kecurangan tidak dilihat dari besar kecilnya perbuatan melainkan dari salah atau benarnya perbuatan tersebut dilakukan.

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Terdapat informasi yang bersifat rahasia organisasi sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih *detail* dan perlu disamarkan.
2. Hasil analisis data bersifat subjektif dari sudut pandang peneliti yang didasari penjelasan informan.

Sebaiknya penelitian selanjutnya fokus membahas satu organisasi mahasiswa karena masing-masing organisasi memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda-beda, selain itu sebaiknya penelitian juga mengambil atau menambah informan dari sudut

pandang pihak lain yang juga berhubungan dengan sistem LPJ dan pendanaan kegiatan, seperti Bagian Keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari suatu fenomena yang terjadi.

Mahasiswa yang nantinya adalah calon pemimpin, sebaiknya terus belajar dan berusaha di jalan kebaikan. Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang merupakan agen perubahan, harapannya mampu membawa perubahan ke arah kebaikan. Dimulai dari setiap pilihan keputusan kecil dalam kehidupan dengan menghindari segala bentuk kecurangan sehingga kelak menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat. Tidak ada salahnya apabila di awal kepengurusan organisasi, Ketua Umum organisasi dan Ketua Panitia kegiatan diambil sumpahnya untuk tidak memberi kesempatan dan tidak melakukan praktik kecurangan dalam organisasi selama kepemimpinannya karena agama sebagai kendali utama seorang mahasiswa melakukan kecurangan, sehingga diharapkan nantinya timbul rasa tanggungjawab yang lebih untuk menjaga organisasinya dari praktik-praktik kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (AD KM FEB UB). Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas (MUMF). (2013), Malang.

Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (ART KM FEB UB). Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas (MUMF). (2013), Malang.

Corruption by Country / Territory . (n.d.) Transparency.org: Electronic references. Diakses pada tanggal 25 September, 2014, dari http://www.transparency.org/country/#IDN_DataResearch

Corruption Perceptions Index 2012. (n.d.) Transparency.org: Electronic references. Diakses pada tanggal 25 September, 2014, dari http://www.transparency.org/cpi2012/results

Indriantoro, N. & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Irianto, G. (2003). Skandal Korporasi dan Akuntan. Lintasan Ekonomi, XX, 2, 104-114.

Kuswarno, E. (2009). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjajaran.

Marks, J. (2014). Playing Offense in a High-Risk Environment. Online, Diakses pada tanggal 5 Juni 2015, dari http://www.crowehorwath.com/elqNow/elqRedir.htm?ref=http://www.crowehorwath.com/folio-pdf/PlayingOffenseHighRiskEnvWP_RISK15938.pdf

Marwahid, H. (2013). Sejarah dan Korupsi. Online, Diakses pada tanggal 22 September, 2014, dari http://sejarah.kompasiana.com/2013/04/26/ sejarah-dan-korupsi555121.html

Purnamasari, D. (2014). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa pada Saat Ujian dan Metode Pencegahannya. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.